

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mayla Hadya (2020), dengan judul *“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan (studi empiris perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019)”*. Tujuan penelitian ini untuk memberitahu bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan. Besar pengaruh ke tiga variabel tersebut secara simultan terhadap kinerja keuangan adalah 94,5%. Hasil lain pada penelitiannya juga menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan menunjukkan hasil bahwa secara parsial kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Namun secara simultan menunjukkan *good corporate governance* mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Joanita Nadia Deanna (2015), dengan judul *“Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur sector industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013)”*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pengambilan sample dengan metode purpose sampling sehingga diperoleh sample sebanyak 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun

2011-2013. Data analisis dengan menggunakan uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan metode regresi berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alina Addiyah (2014), Dalam jurnal yang berjudul “***Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perbankan (studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2010-2012)***”. Peneliti menyebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan pada tahun 2010 – 2012. Penelitian tersebut menggunakan 76 sample yang diambil dari perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan periode 3 tahun. Hasil dari penelitian tersebut bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aksa Khadija Daulay (2017), yang berjudul “***Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016***”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian 2013-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Dalam penentuan sample penelitian tersebut menggunakan *purpose sampling*, sehingga diperoleh 29 sample dari 35 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016, sehingga total sample dalam penelitian tersebut berjumlah 116 sample. Pengelolaan data dalam penelitian tersebut

dilakukan dengan mengimput dan menghitung data dengan *Microsoft Excel* dan melakukan pengujian dengan menggunakan *software SPSS*.

Penelitian yang dilakukan oleh Inka, I Dewa Made, dan Putu Edy (2020), yang berjudul ***“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”***. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan dibentuknya komite audit mampu untuk mengawasi manajemen dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Kepemilikan institusional juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh industry diluar perusahaan mampu menjadi kontroler dalam pengambilan keputusan oleh manajemen sehingga tercipta kinerja keuangan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi. Analisis ini memprediksi bagaimana variabel independen yaitu komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan pada penelitian ini yang diukur melalui ROE.

Dalam jurnalnya penelitian yang dilakukan oleh Lawrence Okoye, Felicia Olokoyo, Johnson Okoh, Felix Ezeji, dan Rhoda Uzohue (2019), dengan judul ***“Effect of Corporate Governance on The Financial Performance of Commercial Banks in Nigeria”***. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana performen kinerja keuangan bank yang ada di Nigeria. Bank diharapkan beroperasi dalam standar tata telola yang dapat diterima. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis regrasi yang disajikan tabel penelitian tersebut. Mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap tata kelola perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajala Oladayo Ayorinde, Amuda Toyin, dan Arulogun Leye (2014), yang berjudul ***“Evaluating the Effect of Corporate Governance on the Performance of Nigeria Banking Sector”***. Penelitian ini

meneliti tentang efek dari *corporate governance* terhadap kinerja perbankan Nigeria. Sampel dari penelitian ini adalah 24 bank komersial di Nigeria selama periode 2006-2010. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, kinerja, *return on equity*, ekuitas direksi, dan bunga dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan negative antara ukuran dewan dan kinerja bank sementara persentase kenaikan *return on equity* di pengaruhi oleh ekuitas direksi, bunga dan tingkat pengungkapan tata kelola perusahaan, namun tidak ada keseragaman dalam pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh bank-bank di Nigeria.

Penelitian yang dilakukan oleh Olayinka Marie Uadiale (2012), dengan judul “*Earnings Management and Corporate Governance in Nigeria*” menerangkan bahwa manajemen laba mendapat banyak perhatian akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan keterkaitannya dengan keandalan laporan akuntansi yang diterbitkan. Indikasi dari literature akademis telah menunjukkan bahwa praktik manajemen luas diantara perusahaan publik. Sebagai tanggapan atas permintaan proporsi direktur independen yang lebih besar mengenai dewan direksi perusahaan dan kebutuhan akan kecanggihan financial anggota komite audit, studi ini menguji peran dewan direksi dan komite audit dalam memanaj laporan keuangan perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi (*Agency Theory*) merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Hal ini yang dibahas dalam teori ini adalah hubungan antara principal (pemilikan dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Teori agensi menurut Scott (2015), adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal. Dalam teori keagenan terdapat

asimetri antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan yang dapat menimbulkan masalah. Masalah dapat terjadi diantaranya karena adanya pihak – pihak yang mementingkan diri sendiri, masing – masing pihak berusaha melakukan apapun agar keinginan mereka tercapai dan mengakibatkan munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham mengharapkan saham yang ditanam menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dan cepat dalam proses pengembaliannya, sedangkan manajer berharap mendapatkan kesejahteraan yang layak dari hasil kerja kerasnya selama diperusahaan.

Dalam sebuah teori keagenan terjadi asimetri informasi atau dapat disebut dengan ketidakseimbangan informasi. Berdasarkan beberapa pendapat diketahui bahwa setiap individu akan berusaha mensejahterakan dirinya sendiri, sehingga *agent* akan menyembunyikan berbagai informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dengan memanfaatkan adanya ketidakseimbangan informasi serta masalah yang dimilikinya. Ketidakseimbangan informasi serta masalah yang terjadi dapat mendorong *agent* dalam menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. (Wulandari : 2014).

Teori agensi dapat di asumsikan bahwa masing – masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agen*. *Principal* memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan *agen* memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya. Konflik akan terus meningkat karena *principal* tidak dapat mengawasi aktifitas *agen* sehari – hari untuk memastikan bahwa *agen* telah bekerja sesuai dengan keinginan dari *principal*. Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara *agen* dan *principal* ini adalah melalui pengungkapan informasi oleh manajemen, dimana sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance*. Dengan demikian, di harapkan *agen* dapat bekerja memenuhi permintaan dari *principal*. Hal ini akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan.

Good Corporate Governance merupakan konsep dari teori keagenan, yang berfungsi untuk *agent* dan *principal* agar mentaati peraturan yang sudah

disepakati dan sebagai alat yang memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan demikian, adanya penerapan *good corporate governance* ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Najihah : 2017).

2.2.2 Teori Asimetri Informasi (*Information Asymmetry Theory*)

Pengertian asimetri informasi menurut Suwarjono (2014:584):

“Asimetri informasi adalah dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor/kreditor”.

Menurut Mahmud M. Hanafi (2014:217), mengatakan bahwa :

“Konsep *Signaling* dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar”.

Asimetri informasi biasanya terjadi karena manajer lebih unggul dalam menguasai informasi dibandingkan pemegang saham. Teori asumsi dapat disimpulkan bahwa individu bertindak untuk mengoptimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan teori asimetri yang dimiliki maka akan mendorong manajer untuk menghilangkan beberapa informasi yang tidak diketahui pemegang saham sebagai pemilik sehingga dengan adanya asimetri antara manajemen dengan pemegang saham memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan peningkatan kualitas kinerja keuangan perusahaan.

2.2.3 Good Corporate Governance

2.2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance

Sukrisno Agoes dan Ardana (2013:101) “*Good Corporate Governance* merupakan tata kelola yang baik sebagai suatu system yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan penagku kepemilikan

lainnya". Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang tranparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Peranan *corporate governance* dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan, dengan actor utamanya adalah manajemen puncak perusahaan yang berwenang untuk menetapkan kebijakan perusahaan dan menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* yang dikemukakan oleh Effendi (2016:3) mendefinisikan bahwa :

“*Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan.

***Corporate Governance* menurut Kusmayadi. et al., (2015) adalah :**

“Rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. *Corporate Governance* disebut juga sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan. ”.

Struktur *Good Corporate Governance* atau biasa disebut GCG dalam suatu perusahaan bisa jadi dapat menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan, dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran yang utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan Negara yang menggunakan system *Two Tier*, dimana dewan terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris merupakan pihak yang melakukan

fungsi memantau terhadap kinerja manajemen, sedangkan dewan direksi merupakan pihak yang melakukan fungsi operasional perusahaan sehari-hari.

Struktur GCG (*good corporate Governance*) dalam suatu perusahaan akan sangat menentukan nilai perusahaan dan tingkat kesehatan perusahaan. Aspek-aspek penting dari *Corporate Governance* yang perlu dipahami oleh perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia bisnis adalah :

1. Terjadinya keseimbangan antara bagian-bagian perusahaan diantaranya yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.
2. Pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder.
3. Terdapat hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan.
4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi materiil dan relevan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, *good corporate governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan professional.

2.2.3.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Menurut Kusmayadi. *et al.* (2015:16), secara umum, penerapan *Corporate Governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholder* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholder* dan *stakeholder*.
4. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Terdapat 5 (lima) komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate governance yaitu ,fairness, accountability, transparency, responsibility dan independensi. Keempat komponen tersebut terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Konsep good corporate governance baru terkenal di Asia. Konsep ini dikenal berkembang sejak tahun 1990-an.

Dari berbagai tujuan diatas pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan merupakan tujuan utama yang hendak tercapai. Prinsip-prinsip dari Corporate Governance yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan oleh Organization for Economic Cooperation and Delevopment (OECD), adalah :

1. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tepat memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Transparency (Transparansi)

Menyajikan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan, pengungkapan informasi yang bersifat penting dan penyebaran informasi yang telah diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas. Perusahaan juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Responsibility (Pertanggung-jawaban)

Bentuk pertanggung-jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya : masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, pemeliharaan lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab

kepada shareholder juga kepada stakeholder lainnya. Memastikan dipatuhinya perangkat peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai gambaran untuk dapat dipatuhinya nilai-nilai social, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dan dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaannpihak yang berkepentingan.

5. Independensi (Independen)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen ehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat intervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntu adanya rentan kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang membuat dan proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pihak-pihak tertentu. Yang pada intinya dalam prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara propefional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Bersadarkan prinsip-prinsip diatas sebaiknya dalam mengurus perusahaan diimbangi dengan good faith (itikad baik) dank ode etik perusahaan dapat terwujud. Peraturan-peraturan yang telah dibuat hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan terhadap pelaku usaha untuk menjalankan corporate governance secara konsekuen dan konsisten. Hal ini penting karena mengingat kecenderungan aktifitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

2.2.3.3 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Kusmayadi. *et al.*, (2015:13), secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip *good corporate governance* ada beberapa manfaat yang bisa diambil antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
2. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
3. Meningkatkan *corporate value*.
4. Meningkatkan kepercayaan investor.
5. Menciptakan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada public luas dalam jangka panjang.
6. Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Menurut Tjager *et al.* yang dikemukakan oleh Agoes dan Ardana (2013:106), ada lima point alasan mengapa penerapan *good corporate governance* itu bermanfaat yaitu :

1. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh *McKinsey Company* bahwa para investor institusional lebih manaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan *good corporate governance*.
2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance*.
4. Walaupun *good corporate governance* bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, system ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.

5. Secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.2.3.4 Unsur-Unsur Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012:41), ada beberapa unsur dalam *corporate governance* yang bisa menjamin berfungsinya *good corporate governance* yaitu :

1. *Corporate Governance – Internal* perusahaan.
Merupakan unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam adalah :
 - a. Pemegang saham
 - b. Direksi
 - c. Dewan komisaris
 - d. Manajer
 - e. Karyawan/ serikat pekerja
 - f. System remunerasi berdasarkan kinerja
 - g. Komite audit.
2. *Corporate Governance – External* perusahaan.
Merupakan unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan. Unsur yang berasal dari luar adalah :
 - a. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
 - b. Investor
 - c. Institusi penyedia informasi
 - d. Akuntan public
 - e. Intitusi yang memihak kepentingan public bukan golongan.
 - f. Pemberi pinjaman
 - g. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

2.2.3.5 Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi”. Dewan komisaris merupakan fungsi control yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktik dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistis manajemen.

Sutedi (2012) mengatakan bahwa komisaris memegang peranan yang penting di dalam perusahaan. Dalam kerangka *corporate governance* dewan komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategic perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas komisaris ini ditujukan agar perlindungan terhadap para penanam modal serta *stakeholder* lainnya dikelola oleh perusahaan dengan amat baik.

2.2.3.6 Dewan Direksi

Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), “Dewan Direksi berwenang penuh dan bertanggung jawab penuh mengurus perseroan, serta dalam beberapa kesempatan mewakili perseroan. Dewan direksi menentukan kewajiban perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang, mengendalikan operasional sehari-hari perusahaan dalam batas tertentu sesuai dengan anggaran dasar, dan RUPS, serta dalam pengawasan dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, prinsip yang harus dipenuhi adalah proporsi atau komposisi dewan direksi dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengambil keputusan secara cepat, tepat, efektif, dan independen. Dewan direksi menjadi focus penerapan *corporate governance* karena salah satu tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan pengelolaan sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi yang di dasarkan pada prinsip *corporate governance* (Zulkarnain dan Wuri Mirawati : 2019).

2.2.3.7 Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) yang dikemukakan oleh Effendi (2016) mendefinisikan bahwa komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Menurut Sutedi (2012), dalam melaksanakan tugasnya komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal audit
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris/dewan pengawas

2.2.3.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah sebuah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan bisa diartikan sebagai nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang bisa diukur dengan menggunakan logaritma dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan di akhir periode (Puspitasari & Made 2014). Menurut Hart dan Oulton yang dikemukakan oleh Adriana (2015), “untuk memperkecil data total aktiva digunakan Logaritma Natural (\ln), karena variabel total aktiva merupakan variabel yang memiliki satuan angka paling besar yang berpotensi menimbulkan heteroskedastisitas sehingga harus ditransformasikan ke Log Natural”.

Ukuran perusahaan cenderung mencerminkan penilaian pemegang saham atas keseluruhan aspek dari *financial performance* di masa lampau dan perkiraan dimasa yang akan datang. Semakin besarnya asset perusahaan akan membuat perusahaan memiliki kestabilan dalam kondisi keuangannya sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh modal dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki asset yang lebih rendah. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dan kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam dunia industri.

2.2.4 Kinerja Keuangan

2.2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja menurut sugiyarsono dan winarmi (2015) yaitu hasil atau tingkat keberhasilan perusahaan selama periode tertentu dalam melakukan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja juga dapat diartikan sebagai performa perusahaan yang dapat menggambarkan kesehatan perusahaan.

Performance atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai suatu tuju dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk pencapao tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan unutk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan.

Sementara itu, menurut Fahmi (2014), “Kinerja keuangan adalag suatu analisis yang dilakukan unutk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2009) bahwa :

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya”.

Maka dari pengertian kinerja keuangan dan kinerja yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah tingkat keberhasilan perusahaan yang dicapai dalam mengelola keuangan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan.

2.2.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Mengenai pengukuran kinerja keuangan dapat diartikan sebagai “*performing measurement*” , yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Pengukuran tersebut dilakukan untuk perbaikan kualitas selama kegiatan operasional sehingga perusahaan bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Untuk menilai kinerja keuangan dari sejumlah alat analisis, dalam penelitian ini akan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu *Return On asset (ROA)*. ROA adalah salah satu rasio profitabilitas yang bisa mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Menurut Fahmi (2014:201) *Return On Asset* melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan dapat memberikan pengembalian keuangannya sesuai dengan harapan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. *Return On Asset* menurut Brigham dan Houston (2012:148) dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Antar Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris adalah bagian penting dari mekanisme *corporate governance* yang bertujuan untuk memberikan petunjuk pada manajemen eksekutif dan mengawasi manajemen. Dewan komisaris harus profesional terintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk memastikan bahwa direksi memperhatikan kepentingan semua pihak. Akan tetapi, ukuran dewan komisaris yang berjumlah besar kurang efektif dalam memantau kinerja manajemen perusahaan karena sulitnya komunikasi antar anggota dewan komisaris dan menambah waktu dalam pengambilan keputusan. Penelitian Aksa Khadijjah (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan tanda positif. Apabila perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang ideal tidak berjumlah besar atau tidak berjumlah kecil maka perusahaan tersebut akan lebih mudah dalam berkomunikasi antar dewan komisaris dan lebih tepat waktu dalam mengambil keputusan. Berdasarkan keterkaitan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan.

2.3.2 Hubungan Antar Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *corporate governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. Namun dapat dikatakan bahwa

pengaruh dewan direksi terhadap kinerja perusahaan akan tergantung dari karakteristik pada masing-masing perusahaan terkait. Kaitan tersebut terutama dengan karakteristik perusahaan secara keuangan dibanding dengan perusahaan yang sedang dalam masalah keuangan. Dalam penelitian Alina Addiyah (2014), menyatakan adanya hubungan positif antara dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. Ukuran dewan direksi beda halnya dengan ukuran dewan komisaris dalam mempengaruhi kinerja keuangan. Ukuran dewan direksi dengan jumlah besar akan lebih berpengaruh baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan jumlah dewan direksi yang besar maka fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan akan lebih efektif dan berpengaruh baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan keterkaitan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₂ : Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan.

2.3.3 Hubungan Antar Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati system pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Dalam penelitiannya Maria Fransiska (2013), mengatakan komite audit bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jumlah komite audit yang semakin banyak akan memberikan control yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan jumlah komite audit yang ideal antara 4 sampai dengan 6 dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan karakteristik diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃ : Komite Audit Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan.

2.3.4 Hubungan Antar Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan

Putu Ayu dan Gerianta (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar asset, maka semakin besar modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal oleh masyarakat.

Perusahaan besar biasanya dipandang sebagai perusahaan yang relative stabil dan mampu menghasilkan laba yang cukup tinggi. Apabila suatu perusahaan memiliki total asset yang besar dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan besar. Investasi akan melihat perusahaan besar sebagai perusahaan yang baik untuk menanamkan dananya sehingga memiliki nama atau reputasi yang baik di mata pihak eksternal. Dengan reputasi yang baik, manajer akan semakin berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dan manipulasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan akan berkurang sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian Joanita Nadia Deanna (2015), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dimana dalam penelitiannya menunjukkan tanda yang positif.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

H₄ : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Adapun gambaran dari penelitian ini secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh kerangka penelitian pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

